

Tinjauan yuridis perbuatan melawan hukum dalam pelaksanaan lelang aset jaminan (sebagai akibat kepailitan) (Studi kasus Putusan No. 480/PDT.G/2011/PN.JKT.PST) = Legal study on unlawful act in the implementation of auction over security right assets due to bankruptcy (Case study of Decision no. 480/PDT.G/2011/PN.JKT.PST).

Hutajulu, Suci Arta Esa Mandiri, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20330946&lokasi=lokal>

Abstrak

ABSTRAK

Skripsi ini mengangkat topik mengenai pelaksanaan lelang atas aset yang menjadi jaminan kredit debitur (sebagai akibat kepailitan). Pelaksanaan lelang aset jaminan pada dasarnya dimungkinkan atas alasan debitur dalam keadaan lalai memenuhi perjanjian/cidera janji terhadap perjanjian serta sebagai konsekuensi dari kesepakatan yang telah dibuat dalam perjanjian. Selanjutnya, pelaksanaan lelang yang tidak sesuai dengan prosedur dalam peraturan lelang atau peraturan lain terkait, maka dapat dianggap sebagai Perbuatan Melawan Hukum (PMH), dimana selama memenuhi unsur dalam Pasal 1365 KUHPerdara. Penulis mengangkat kasus mengenai debitur pailit yang mengajukan gugatan PMH atas pelaksanaan lelang aset jaminan Hak Tanggungan milik oleh bank sebagai kreditor. Dapat disimpulkan bahwa pengaturan terhadap eksekusi aset jaminan Hak Tanggungan tersebut, dalam kenyataannya masih memiliki celah hukum yang dapat memungkinkan terjadinya PMH baik dalam hal prosedur maupun belum ada peraturan yang tegas mengenai penentuan nilai limit objek lelang, sehingga perlu ada peraturan pelaksana yang lebih rinci agar tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda bagi para pihak yang terlibat, serta menjamin dalam pelaksanaannya dapat memenuhi rasa keadilan baik bagi pihak kreditor maupun debitur, terutama dalam menilai/menentukan nilai objek yang dijamin.

<hr>

ABSTRACT

This academic essay raises a topic which relates to the implementation of an auction over assets of a debtor as his credit security (resulting from a bankruptcy). The implementation of an auction over the secured assets may in principle be permitted as a result of failure of a debtor to comply with the provisions/conduct a default of an agreement as well as a consequence of an agreement set forth in a contract already entered into. In addition, the implementation of an auction not in conformity with auction procedures or other relevant provisions shall be considered an Unlawful Act (PMH), so long as it meets the elements set forth in Article 1365 of the Indonesian Civil Code/KUHPerdara. The writer of this academic essay raises a case which relates to a bankrupt debtor who filed a PMH claim against the implementation of an auction over his Security Right Assets by a bank as a creditor. A conclusion may be drawn that in practice an execution of the Security Right Assets still leave a loophole for the occurrence of a PMH, be it in the procedures or absence of confirmed provisions as to the determination of the limit of the auctioned objects' value. Therefore, it shall be necessary to establish a more detailed implementing regulation to avoid varied interpretation among involving parties and at the same time to give assurance of justice in the implementation thereof for creditors and debtors alike, particularly, in determining/calculating the value of the secured objects.